Nama:Andri irwansya

Nim:10200120163

Kelas:HTN D

Resumen hukum tata negara

A.PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA

Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga didalam suatu negara, yaitu eksekutif,legislatif dan yudikatif.

Ada suatu pengertian yang luas mengenai Hukum Tata Negara,namun tidak mendalam.

Dalam pengertian tersebut dikatakan bahwa Hukum Tata Negara merupakan bagian dari hukum me-ngenai sistem pemerintahan suatu negara. Sebaliknya, ada pengertian yang sempit dari Hukum Tata Negara, seperti dikemukakan oleh Maurice Duverger. Dalam definisinya Maurice mengemukakan bahwa Hukum Tata Negara hanya peraturan mengenai lembaga-lembaga politik (lembaga-lembaga negara) dan fungsi-fungsinya,mengenai kedudukan warga negara tidak dinyatakan secara eksplisit.

Selain pengertian hukum tata negara diatas masih banyak pengertian hukum tata negara dari para ahli, sama halnya dengan hukum yang tidak bisa diartikan secara universa sampai saat ini pun masih belum adasatu pengertian hukum tata negara yang mengandung arti yang universal.

Demikian juga Ada banyak cabang ilmu yang berkaitan dan berhubungan dengan Hukum tata negara bebrapa diantaranya adalah hubungan tata negara dengan ilmu negara dimana hukum tata negara maupun ilmu negara sama-sama menjadikan negara sebagi objek kajiannya.

Bedanya, kajian hukum tata negara lebih dibatasi tempat,keadaan, dan waktu tertentu sementara kajian ilmu negara bersifat umum/universal. hubungan tata negara dengan hukum administrasi negara, sama halnya dengan hukum tata negara dan ilmu negara yang menjadikan

negara sebagai objek kajian , hukum administrasipun menjadikan negra sebagai objeknya perbedaannya hukum tata negara yang meentukan lembaga dan wewenangnya sedangkan administrasis negra yang mengatur jalannya wewenang dari suatu lembaga negara yang diberikan oleh hukum tata negara.

RuangLingkupHTN

-Lembaga Negara

-Konstitusi

-Bentuk dan sistem pemerintahan

- Batas dan otonomi kekuasaan
- Hak Asasi Manusia
- prinsip dan hubungan antar negara

B. SUMBER SUMBER HUKUM TATA NEGARA

- Sumber Hukum Tata Negara

Pengertian sumber hukum tata negara secara etimologis berasal dari istilah "sumber" dan "hukum tata negara". Sumber berarti tempat/sumber asal usul hukum positif yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum terdiri sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan hukum tata negara, menurut Logemann adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Jadi, sumber hukum tata negara adalah sumber/asal usul dari mana hukum tata negara itu berasal, apakah dari hukum tertulis dan/ atau tidak tertulis.

Dalam pasal 1 ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 ditentukan bahwa

1. sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan
2. sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis
3. sumber hukum dasar nasional adalah yang pertama Pancasila sebagai mana yang tertulis dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, yaitu ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- Sumber Hukum Tata Negara menurut Bagir Manan ada 2 yaitu:

- 1) Sumber hukum dalam arti materiil.

Adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum HTN, yang termasuk misalnya: Dasar dan pandangan hidup. Kekuatan politik yang berpengaruh pada saat perumusan hukum tata negara.

- 2) Sumber hukum tata negara dalam arti formal

Adalah sumber hukum yang dilihat dari segi bentuknya terdiri atas:

- a. Hukum perundang undangan ketatanegaraan
- b. Traktat
- c. Doktrin
- d. Konvensi
- e. Hukum adat ketatanegaraan

- Pengertian dan Istilah Sumber Hukum

Sumber hukum dalam arti formil diantaranya :

- Hukum perundang-undangan ketatanegaraan
- Hukum adat ketatanegaraan

C.ASAS ASAS HUKUM TATA NEGARA

Asas hukum tidak dapat dikatakan sebagai peraturan-peraturan maupun norma-norma yang ada melainkan Asas hukum merupakan landasan atau dasar pemikiran yang umumnya digunakan sebagai petunjuk-petunjuk untuk menemukan sebuah produk hukum dan hukum itu berlaku.

Asas hukum merupakan penghubung antara norma hukum dengan cita-cit sosial dan pandangan etis masyarakat. Sehingga untuk memahami peraturan hukum suatu bangsa maka harus diawali dengan memahami asas-asas hukumnya

Adapun fungsi dari asas hukum adalah asas hukum sebagai penjangka konsistensi dimana asas hukum ini berfungsi untuk menjaga agar dalam proses pembentukan peraturan hukum maupun dalam penerepannya agar tetap berpacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Selain itu fungsi lain dari asas hukum adalah fungsi asas hukum untuk mengatasi konflik, asas hukum dapat dijadikan sebagai salah-satu cara untuk mengatasi pertentangan yang terjadi antar peraturan hukum maupun organ/lembaga negara. Karna tidak dapat kita pungkiri bahwa dipersidangan kerap kali kita menemukan adanya perbedaan yang akan menyebabkan pertentangan antar peraturan hukum maupun tindakan pemerintahan yang satu dengan yang lainnya. Dalam keadaan demikian asas hukum dapat difungsikan sebagai alat atau instrument untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik.

Asas Kekeluargaan

Asas Kedaulatan Rakyat

Asas Pembagian Kekuasaan

Asas Negara Hukum

Asas Pancasila

D.SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA

Sejarah berasal dari bahasa arab yaitu “syajaratun” yang artinya adalah pohon. Pohon yang berbentuk seperti cabang dan ranting yang mengibaratkan silsilah kehidupan manusia yang turun temurun dan menciptakan sebuah sejarah.

Konstitusi adalah norma hukum dasar yang di jadikan sebuah pegangan dalam sebuah

penyelenggaraan sebuah Negara. Konstitusi ini terdiri atas dua yaitu konstitusi yang tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Dan Indonesia adalah Negara yang menganut konstitusi yang tertulis yang dinamakan dengan undang-undang dasar.

Sebagai hukum dasar konstitusi dapat berbentuk Dapat pula tidak tertulis. Indonesia menganut konstitusi tertulis yang disebut dengan undang-undang dasar titik sejarah ketatanegaraan Indonesia telah beberapa kali mengalami pergantian

Dimulai dari UUD 1945, konstitusi RIS, UUD sementara, dan akhirnya kembali ke UUD 1945 lalu,

Kemudian mengalami perubahan pada tahun 1999, 2000, 2001, dan tahun 2002.

Konstitusi sebagai objek kajian hukum tata negara

A. Pengertian konstitusi terbagi atas dua yaitu:

1. Konstitusi dalam pengertian sempit adalah konstitusi yang terdokumentasi/tertulis (loi constitutionnelle) yang berisi ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan dasar atau hukum dasar (piagam, treaty, dan undang-undang dasar).

2. Konstitusi dalam pengertian luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan dasar atau hukum dasar (droit constitutionnel), baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Setelah Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 maka Indonesia yang berlaku adalah HTN Indonesia masa awal kemerdekaan sampai berlakunya undang-undang dasar 1945 di NKRI yang merupakan salah satu negara bagian dalam negara RIS

sampai masa berlakunya undang-undang dasar 1945 sampai masa orde lama sampai masa orde baru sampai masa orde reformasi. Penegakan HTN dilakukan melalui lembaga negara penegak HTN yaitu Mahkamah Konstitusi.

Jika kita meneliti aspek-aspek tertentu, akan sangat memungkinkan kita menemukan kondisi dimana akan disimpulkan bahwa pasal aquo belum terimplementasi, misalnya penerapan pasal 33 dan pasal lain dalam UUD. Belum lagi pandangan dari org-org/pihak-pihak yg secara langsung merasa dirugikan secara konstitusional oleh kebijakan pemerintah.

Jika penyelenggara negara betul-betul menyadari lalu kemudian menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka sangat kecil peluang terjadinya penyimpangan dalam proses penyelenggaraan negara. Praktik-praktik koruptif tidak akan terjadi jika nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dasar yang tertulis

E.KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK KAJIAN HUKUM TATA NEGARA

Konstitusi dalam pengertian sosial politik. Pada tingkatan pertama ini konstitusi tumbuh dalam

pengertian sosial politik. Ide-ide konstitusional dikembangkan karena memang mencerminkan

keadaan sosial politik dalam masyarakat yang bersangkutan pada saat itu titik konstitusi pada tahap ini dapat digambarkan sebagai kesepakatan-kesepakatan politik yang belum dituangkan dalam bentuk hukum tertentu melainkan tercermin dalam perilaku nyata dalam kehidupan kolektif warga masyarakat.

-Pengertian Konstitusi sebagai Objek Kajian Hukum Tata Negara

Istilah konstitusi berasal dari bahasa perancis (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.

Tujuan konstitusi

-konstitusi bertujuan untuk menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat agar menjadi pedoman penyelenggaraan negara.

-konstitusi bertujuan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah.

-konstitusi bertujuan untuk menjamin hak-hak rakyat.

Fungsi dan tujuan konstitusi :

- sebagai sumber hukum

-sebagai penentu, pembagi, dan pembatas kekuasaan organ negara

-sebagai pemberi/penyalur/pengalih kewenangan kepada organ negara

-sebagai pengatur hubungan organ negara

-sebagai pengatur hubungan antara organ negara dengan warga negara

-sebagai symbol of unity, sosial kontrol, engineering dan sebagai identity of nations

Sebuah konstitusi dibuat karena memiliki fungsi. Adapun tujuan dan fungsi dari konstitusi adalah sebagai sumber hukum, sebagai alat untuk mengatur organ-organ negara, dan sebagai symbol of unity, social control, social engineering dan sebagai identity of nation. Selain fungsi sebuah konstitusi pun memiliki tujuan. Tujuan konstitusi diantaranya adalah (1) menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara baik dalam menetapkan maupun melaksanakan

kekuasaan (2) membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah (3) menjamin hak-hak rakyat.

Contoh konvensi-konvensi yang pernah timbul dan konvensi yang tetap terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara Indonesia.

Pemberantasan korupsi juga harus sesuai dengan konstitusi karena kalau tidak maka akan mengacau sistem ketatanegaraan. Mengingatkan para pihak yang dituduh korupsi untuk bisa memperjuangkan hak mereka sesuai konstitusi. Dalam hukum ketatanegaraan, seseorang hanya bisa dijerat dengan kasus korupsi hanya jika korupsi yang dimaksud sesuai dengan constitutional intent atau makna konstitusi.

F. ORGAN DAN FUNGSI KEKUASAAN NEGARA
Sistem pemerintahan merupakan suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan negara.

Sistem tersebut terdiri dari berbagai macam komponen dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pembagian kekuasaan di Indonesia:

Kekuasaan legislatif

Kekuasaan legislative adalah kekuasaan yang memiliki tugas untuk membuat undang undang. Dalam kekuasaan legislatif adalah lembaga tertinggi Negara diantaranya adalah MPR, DPR, dan

DPD. Dan lembaga ini Memiliki fungsi mengajukan rancangan UUD yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah dan bertugas mengawasi pelaksanaannya.

Kekuasaan eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah suatu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan bertanggung

jawab untuk melakukan hukum diantaranya yaitu Presiden, wakil presiden, dan para Menteri.

Kekuasaan eksekutif berfungsi untuk melaksanakan undang undang, dan menyelenggarakan segala urusan pemerintahan dan memperkuat tata tertib dan keamanan dalam Negara

Kekuasaan yudikatif

Kekuasaan yudikatif kekuasaan lembaga yang berfungsi menjaga undang undang sekaligus mentaati undang undang diantaranya Mahkamah Agung, mahkamah konstitusi, dan komisi yudisial. Lembaga ini juga berfungsi untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar hukum yang ada di indonesia.

Cabang yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung/MA yang dan sebuah Mahkamah

Konstitusi/MK yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan Inspektif dikendalikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki perwakilan

di setiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.

sistem campuran. Sistem pemerintahan itu dikatakan bersifat parlementer apabila (a) sistem kepemimpinannya terbagi dalam jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai dua jabatan yang terpisah; dan (b) jika sistem pemerintahannya ditentukan harus bertanggung jawab kepada parlemen sehingga dengan demikian; (c) kabinet dapat dibubarkan apabila tidak

mendapat dukungan parlemen; dan sebaliknya (d) parlemen juga dapat dibubarkan oleh Kepala

Negara apabila dianggap tidak dapat memberikan dukungan kepada pemerintah.